

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas di Kabupaten Merangin dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap jabatan fungsional Kepala Puskesmas di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagian besar Responden tidak setuju Kepala Puskesmas masih dalam jabatan struktural, sebagian besar setuju dalam jabatan fungsional, dan sebagian besar membenarkan bahwa pemerintah Kabupaten Merangin belum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait jabatan fungsional Kepala Puskesmas, serta sebagian besar Kepala Puskesmas menyatakan sudah ada koordinasi antara Dinas Kesehatan, BKPSDM, bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin.
 - b. Seluruh Kepala Puskesmas menyetujui bahwa Jabatan Kepala Puskesmas sebagai pejabat struktural perlu dilakukan evaluasi,
 - c. Sebagian Kepala Puskesmas menyatakan tidak pernah dan sebagian lainnya menyatakan pernah dilakukan pembahasan dalam bentuk pertemuan Kepala Puskesmas dengan Kepala Dinas Kesehatan beserta

seluruh Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan pada monitoring evaluasi kinerja Puskesmas per triwulan,

- d. Sudah terbentuk aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sudah terbentuk juga aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap jabatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:
 - a. Masih ada Kepala Puskesmas yang belum memenuhi syarat administratif untuk dilantik kembali menjadi Kepala Puskesmas.
 - b. Peraturan Bupati Merangin tentang Puskesmas belum memuat jabatan fungsional Kepala Puskesmas.
 - c. Terganjil dengan undang-undang Pemilu yang melarang pemerintah daerah untuk melantik Kepala Puskesmas.
 - d. Belum ada pertemuan khusus untuk membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin.
 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah terhadap jabatan Kepala Puskesmas di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah terkait sedang merumuskan Peraturan Bupati yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Organisasi Perangkat Daerah terkait sedang mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Merangin untuk melantik kembali Kepala Puskesmas menjadi jabatan fungsional.

B. Saran

Saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Agar DPRD Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Agar Bupati Kabupaten Merangin melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Merangin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Merangin mengusulkan nama-nama Kepala Puskesmas yang memenuhi syarat untuk dilantik kembali dalam jabatan fungsional. Untuk Kepala Puskesmas yang belum memenuhi syarat administratif ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Puskesmas.

4. Agar Bupati Kabupaten Merangin melantik kembali Kepala Puskesmas dalam jabatan fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anik Iftitah dkk, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Aris Prio Agus, dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto dkk, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Eka Deviani, Rifka Yudhi, 2022, *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Marwan Mas, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh Shohib, 2023, *Perlindungan Hak Anak Berdasarkan: The Correlative Of A Duty*, STIH Painan, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB
- Novita Tresuana Dan Noverman Duadji, 2021, *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi)*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Otom Mustomi dkk, 2024, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Media Penerbit Indonesia, Kota Medan.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2022, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian, Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zainuddin Ali, M. A, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

C. Sumber lain

“Implementasi” KBBI, diakses pada tanggal 22 April 2025.

“Jabat”, <https://kbbi.web.id/jabat>, diakses pada tanggal 22 April 2025.

Afga Samudra Erlangga dan Kevin Hartono, 2024, Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi, Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium (ISSN 3047-955X), UNAIR.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Buktikan anda layak menjadi Kepala Puskesmas untuk Jayapura sehat, <https://dinkes.jayapurakab.go.id/buktikan-anda-layak-menjadi-kepala-puskesmas-untuk-jayapura-sehat/#:~:text=Kepala%20Puskesmas%20merupakan%20tugas%20tambahan,Puskesmas%20bersama%20Kepala%20Tata%20Usaha.> diakses pada tanggal 30 April 2023.

Dede Farhan Aulawi, Wawancara oleh *Indofakta*, Komisioner Kompolnas RI, tanggal 13 Desember 2019, https://www.indofakta.com/news_18735.html, diakses pada 30 Juni 2023.

Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *RechtsVinding Jurnal* ISSN 2089-9009, Jakarta.

Febrian Hilmi Firdaus, 2024. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 53, Nomor 2.

Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Indonesia, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

Hak dan Kewajiban dalam Hukum, <https://cekhukum.com/hak-dan-kewajiban-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Harsanto Nursadi, *Modul 1 Sistem Hukum*, <https://repository.ut.ac.id/4293/1/ISIP4131-M1.pdf>, hlm.25 diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Ina Magdalena, Azza Salsabila, Diah Ajeng Krianasari, Shabira Fairuza Apsarini, 2021, *“Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III”*.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang.

Kabupaten Merangin, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Merangin, diakses pada tanggal 28 April 2025.

Kenaikan Pangkat/Golongan Kepala Puskesmas di Malinau, Terganjal SK Struktural, <https://cakra.news/kenaikan-pangkat-golongan-kepala-puskesmas-di-malinau-terganjal-sk-struktural/>, diakses pada tanggal 26 April 2023.

Melengkapi Sistem Hukum Indonesia,
<http://jurnal.untag.sby.ac.id/index.php/dik/article/view/2244>, diakses
tanggal 5 April 2024.

Muhammad Afifudin, Made Saihu, 2024, *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi: Pengolahan Data*, Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Ptiq Jakarta, hlm. 173

Nur Fitriani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Volume 18 Nomor 2

Pintarnya, <https://layanan.pintarnya.com/kamus/j/jabatan/>, diakses pada tanggal 30 April 2023.

Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS,
<https://fmipa.unpad.ac.id/seputar-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns/>, diakses pada tanggal 26 April 2025.

Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

Tiga Unsur yang Menyatu dalam Pengertian Dasar Hak, 2024,
<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/tiga-unsur-yang-menyatu-dalam-pengertian-dasar-hak-22yLW5cQhK2>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Kabupaten Merangin,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Merangin, hlm 1, diakses pada tanggal 29 April 2023.